

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan sudut pandang ilmu ekonomi, organisasi sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang atau jasa publik dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2002:2).Barang atau jasa publik adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk publik atau masyarakat secara umum tanpa masyarakat tersebut mengeluarkan biaya untuk dapat menikmatinya (Halim dan Kusufi, 2014: 142). Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Organisasi sektor publik mempunyai karakter yang berbeda dengan organisasi privat. Dalam konteks akuntansi pengukuran kinerja organisasi privat berorientasi pada laba sedangkan organisasi sektor publik tidak berorientasi pada laba tetapi berorientasi pada kinerja yang mengarah kepada pencapaian tujuan pemerintah.

Kinerja sektor publik lebih terkait dengan pencapaian tujuan pemerintah yang sudah diatur Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPANRB) No. 29 tahun 2010 tentang tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Menurut, Santoso (2013) LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Dalam melaksanakan pelaporan Akuntabilitas Kinerja, pemerintah mengharuskan pengukuran kinerja berdasarkan Indikator kinerja yaitu 1) Indikator masukan (*input*), 2) indikator proses (*process*), 3) indikator keluaran (*output*), 4) indikator hasil (*outcome*), 5) indikator manfaat (*benefit*), 6) indikator dampak (*impact*).

Penelitian tentang kinerja di Organisasi sektor publik telah beberapa kali dilakukan. Santoso (2013) menganalisis LAKIP Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, untuk mengetahui dan menganalisis apakah LAKIP yang dibuat telah memenuhi fungsinya sebagai alat penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010. Penelitian ini menunjukkan bahwa LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara telah disajikan dengan cukup baik tetapi indikator-indikator kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan tidak dapat terukur dengan jelas.

Subastian dan Riharjo (2013) meneliti tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya Melalui Pendekatan *Value For Money*. Penelitian ini menunjukkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja pada dinas pendidikan di tahun 2011 disajikan sesuai pedoman LAKIP. Sementara kinerja efektivitas dilihat dari rasio antara *output* dan *outcome* perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan relevansinya dengan tujuan program dan kegiatan untuk peningkatan kualitas laporan kinerja instansi yang akan datang.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran sebuah Organisasi sektor publik yang ada di dalam pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dalam melakukan pengukuran kinerja berdasarkan indikator kinerja. Organisasi ini adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO). Dinas PPO mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di TTU karena untuk mendukung pembangunan daerah di perlukan SDM yang berkualitas. Namun pada kenyataannya SDM di kabupaten TTU masih terbilang rendah. Hal ini disebabkan karena rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk yang masih relatif rendah. Penyebaran guru dan tenaga pendidik secara kualitatif dan kuantitatif antar wilayah dan antar sekolah belum merata proporsional. Penduduk usia sekolah yang seharusnya melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak melanjutkan pendidikannya dan keterbatasan guru pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan SMA.

Pada tahun 2015, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mendapatkan anggaran pendidikan sebesar Rp.270.407.716.551. Jumlah anggaran tersebut digunakan untuk menjalankan program yang ada di Dinas PPO sebesar Rp 44.666.728.794. Namun kenyataannya realisasi anggaran hanya sebesar Rp 30.526.827.497 atau secara total program dinas PPO tahun 2015 hanya terserap 68,34%.

Hal ini disebabkan karena ada program yang tidak terserap 100%. Melihat potensinya yang besar dan mempengaruhi SDM pengukuran kinerja di Dinas Pendidikan pantas untuk diprioritaskan, agar pengelolaan anggaran tersebut tentunya dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah adalah melaksanakan pengukuran kinerja menggunakan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Setiap program diukur dengan menggunakan indikator kinerja *input, process, output, outcomes, benefit, impact* sehingga kita dapat melihat kinerja yang telah dilakukan.

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten TTU pada tahun 2015 serta mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan pengukuran kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten TTU melakukan Pengukuran Kinerja pada program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, program peningkatan mutu

pendidik dan tenaga kependidikan dan program pendidikan anak usia dini sebagai evaluasi agar pemerintah dapat meningkatkan mutu pendidikan, akuntabilitas dan kinerjanya di masa yang akan datang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana Evaluasi Indikator Kinerja Dinas PPO kabupaten TTU tahun 2015?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan pengukuran kinerja Dinas PPO Kabupaten TTU?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengevaluasi tingkat ketercapaian tujuan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten TTU.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pengukuran kinerja Dinas PPO Kabupaten TTU.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini adalah:

Manfaat Praktik

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan pendidikan di Kabupaten TTU.

2. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten TTU dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasinya.

Manfaat Akademis

Dapat menambah informasi, pemahaman serta menambah wawasan penulis tentang pengukuran kinerja organisasi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan tentang penelitian terdahulu serta landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengenai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pada Program Dinas PPO Kabupaten TTU. Selain itu juga dijelaskan tentang kerangka berpikir.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang meliputi desain penelitian, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan karakteristik objek penelitian, analisis deskriptif, analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dan pembahasan.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya dan untuk Dinas PPO Kabupaten TTU.